

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Secara garis besar, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutupnya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pola anggaran yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2023 berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, penerapan pola anggaran yang berbasis kinerja tersebut dimaksudkan agar penggunaan APBD Tahun 2023 benar-benar dapat memenuhi indikator sasaran yang diharapkan sesuai fungsi belanja, yang nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023 disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Banjar yaitu meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Realisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui program peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, program peningkatan pengawasan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program penataan peraturan perundang-undangan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dalam hal penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2023 senantiasa menganut sistem kehati-hatian dalam mengalokasikan dana. Kehati-hatian ini senantiasa dijaga agar program- program yang telah direncanakan tetap terpadu.

Berikut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023 :

			APBD-Perubahan
1.	Pendapatan Daerah		Rp2.232.265.489.838,-
2.	Belanja Daerah		Rp2.559.635.131.121,-
		Surplus/defisit	- Rp327.369.641.283,-
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan	Rp363.419.641.283,-	
	b. Pengeluaran	Rp36.050.000.000,-	
		Pembiayaan Netto	Rp327.369.641.283,-
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		-

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023

Pada perubahan anggaran Tahun 2023 target pendapatan lebih kecil dari alokasi belanja. Target pendapatan sebesar Rp2.232.265.489.838,- Dan alokasi belanja sebesar Rp2.559.635.131.121,- sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp327.369.641.283,- defisit anggaran ini ditutup dengan pembiayaan netto.

Anggaran pembiayaan netto yang merupakan selisih antara Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.

2. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada pendayagunaan sumber-sumber keuangan daerah secara optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Optimalisasi pendapatan daerah untuk memperkuat struktur pendapatan asli daerah yang mandiri, stabil dan sesuai dengan potensi yang dimiliki, yakni meningkatkan kemampuan dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada penguatan otonomi daerah, meningkatkan (kapasitas fiskal) kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerahnya melalui kegiatan ekonomi dan pembangunan serta optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan asli daerah. Upaya peningkatan PAD akan dilakukan bijaksana dalam upaya untuk menjaga tetap terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan kemampuan dunia usaha dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banjar berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan. Upaya peningkatan yang dimaksud adalah melalui kebijakan pengembangan efisiensi dan transparansi pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, pengembangan konsep pelayanan yang berbasis teknologi informasi (TI), optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, dan peningkatan optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien.

Penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang berasal dari sektor perikanan, pertambangan umum, kehutanan dilakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan instansi terkait. Pengalokasian dana perimbangan khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Untuk Penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan terkait proses perhitungan dan penetapan dana lebih transparan dan akuntabel, penyempurnaan sistem penyaluran dana tepat waktu dan tepat jumlah.

Berikut Perubahan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

Pendapatan Daerah		Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp250.300.000.000,-
- Pajak Daerah	Rp96.196.000.000,-	
- Retribusi Daerah	Rp8.263.062.975,-	
- Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan	Rp11.083.090.240,-	
- Lain-lain PAD yang sah	Rp134.757.846.785,-	
b. Pendapatan Transfer		Rp1.978.929.489.838,-
- Pendapatan transfer pemerintah pusat	Rp1.855.699.212.000,-	
- Pendapatan transfer antar daerah	Rp123.230.277.838,-	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		Rp3.036.000.000,-
- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp3.036.000.000,-	
Jumlah Pendapatan Daerah		Rp2.232.265.489.838,-

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023

3. BELANJA DAERAH

Belanja daerah digunakan untuk mencatat semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Secara umum belanja daerah Pemerintah Kabupaten Banjar yang tertuang dalam kebijakan umum Perubahan APBD tahun 2023 yang telah ditetapkan, diarahkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banjar, yakni :

“Visi : Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”

“Misi :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan;
3. Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;
4. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif;
6. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur;
7. Menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis”.

Belanja daerah menurut kelompok belanja yang akan dilaksanakan terdiri dari :

- a. Belanja operasi, digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;

- b. Belanja modal, digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga, digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja transfer, digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Berikut Perubahan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :

Belanja Daerah		Belanja
a. Belanja Operasi		Rp1.760.286.975.871,-
- Belanja pegawai	Rp1.006.647.534.561,-	
- Belanja barang dan jasa	Rp658.298.459.216,-	
- Belanja hibah	Rp90.250.288.544,-	
- Belanja bantuan sosial	Rp5.090.693.550,-	
b. Belanja Modal		Rp414.914.397.830,-
- Belanja modal tanah	Rp8.720.000.000,-	
- Belanja modal peralatan dan mesin	Rp105.589.831.537,-	
- Belanja modal gedung dan bangunan	Rp84.424.927.489,-	
- Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp214.563.157.164,-	
- Belanja modal aset tetap lainnya	Rp1.301.481.640,-	
- Belanja modal aset lainnya	Rp315.000.000,-	
c. Belanja Tidak Terduga		Rp8.000.000.000,-
d. Belanja Transfer		Rp376.433.757.420,-
- Belanja bagi hasil	Rp8.916.525.800,-	
- Belanja bantuan keuangan	Rp367.517.231.620,-	
Jumlah Belanja Daerah		Rp2.559.635.131.121,-

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023

4. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan netto yang merupakan selisih antara Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.

Pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit, atau memanfaatkan apabila terjadi surplus anggaran. Penetapan defisit didasarkan pada terjaganya konsolidasi dan kesinambungan fiskal daerah, serta memperhatikan kemampuan daerah. Menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah dimasa kini dan mendatang.

Sebagai sebuah Kebijakan umum pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam anggaran daerah. Sehingga kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan baik yang ditopang oleh alokasi anggaran daerah yang memadai. Secara sederhana kebijakan pembiayaan daerah adalah upaya untuk memperkecil anggaran pada tahun berjalan.

Berikut Perubahan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :

Pembiayaan		Pembiayaan
a. Pembiayaan Penerimaan		Rp363.419.641.283,-
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Rp363.419.641.283,-	
b. Pembiayaan Pengeluaran		Rp36.050.000.000,-
- Penyertaan Modal Daerah	Rp36.050.000.000,-	
Pembiayaan Netto		Rp327.369.641.283,-

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan pada tabel mengenai ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023.

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.300.000.000	250.300.000.000	0
4.1.01	Pajak Daerah	95.037.929.649	96.196.000.000	1.158.070.351
4.1.02	Retribusi Daerah	8.385.320.000	8.263.062.975	(122.257.025)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.498.156.214	11.083.090.240	(11.415.065.974)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	124.378.594.137	134.757.846.785	10.379.252.648
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.907.783.203.428	1.978.929.489.838	71.146.286.410
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.784.552.925.590	1.855.699.212.000	71.146.286.410
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.230.277.838	123.230.277.838	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.036.000.000	3.036.000.000	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.036.000.000	3.036.000.000	0
	Jumlah Pendapatan	2.161.119.203.428	2.232.265.489.838	71.146.286.410
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.772.715.598.337	1.760.286.975.871	(12.428.622.466)
5.1.01	Belanja Pegawai	920.429.859.575	1.006.647.534.561	86.217.674.986
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.641.802.218	658.298.459.216	(130.343.343.002)
5.1.05	Belanja Hibah	58.505.641.544	90.250.288.544	31.744.647.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.138.295.000	5.090.693.550	(47.601.450)
5.2	BELANJA MODAL	326.416.034.167	414.914.397.830	88.498.363.663
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.565.003.412	8.720.000.000	3.154.996.588
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.030.097.858	105.589.831.537	36.559.733.679
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.577.560.362	84.424.927.489	9.847.367.127
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.200.419.435	214.563.157.164	38.362.737.729
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.042.953.100	1.301.481.640	258.528.540
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	315.000.000	315.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.000.000.000	8.000.000.000	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000	8.000.000.000	0
5.4	BELANJA TRANSFER	142.631.188.148	376.433.757.420	233.802.569.272
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800	8.916.525.800	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	133.714.662.348	367.517.231.620	233.802.569.272
	Jumlah Belanja	2.249.762.820.652	2.559.635.131.121	309.872.310.469
	Total Surplus/(Defisit)	(88.643.617.224)	(327.369.641.283)	(238.726.024.059)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	111.943.617.224	363.419.641.283	251.476.024.059
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	111.943.617.224	363.419.641.283	251.476.024.059
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	111.943.617.224	363.419.641.283	251.476.024.059
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.300.000.000	36.050.000.000	12.750.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	23.300.000.000	36.050.000.000	12.750.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	23.300.000.000	36.050.000.000	12.750.000.000
	Pembiayaan Netto	88.643.617.224	327.369.641.283	238.726.024.059
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(0)	(0)
	TOTAL APBD	2.273.062.820.652	2.595.685.131.121	322.622.310.469